

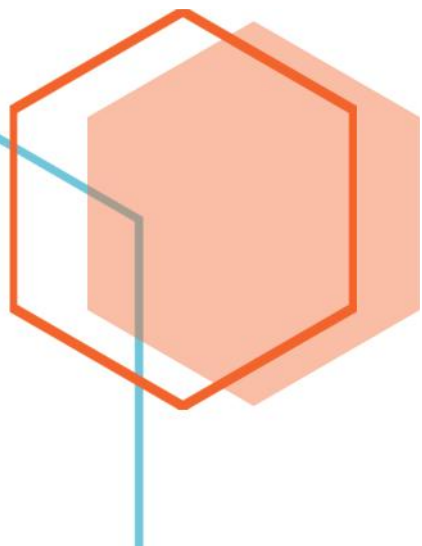


PROGRAM KERJA 2018

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

PPPPTK PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING

Dokumen ini berisi tentang program kerja dan rencana kerja SPI pada tahun 2018 di unit kerja PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling, berdasarkan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam permendikbud No. 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan





PROGRAM KERJA 2018

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

TUGAS

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling

FUNGSI

- a. penyusunan program pengawasan;
- b. pengawasan kebijakan dan program;
- c. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
- d. pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- e. pendampingan dan revidi laporan keuangan;
- f. pemberian saran dan rekomendasi;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- h. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan

Berdasarkan pada acuan tugas dan fungsi di atas maka SPI menyusun program kerja untuk tahun 2018 yang berdasarkan pada fungsi- fungsi yang ada dan data-data dari tahun sebelumnya. Hal ini akan dijabarkan tentang program kerja SPI pada tahun 2018 pada halaman berikut

Satuan Pengawasan Internal (SPI)



Latar belakang dibentuknya SPI adalah salah satu upaya dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efisien, dan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

SPI menjadi bagian penting dalam penegakan akuntabilitas dan pengawasan di lingkungan tempat SPI berada



Sebagai pengawas maka untuk bertugas SPI perlu merancang program-program yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Maka program kerja SPI di lingkungan PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan konseling disusun dalam beberapa bidang.

Program-program ini bertujuan untuk memudahkan dan menjadi acuan bagi anggota SPI dalam memonitoring dan melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pengawasannya.

Penyusunan Program Pengawasan

Pada bidang ini perlu adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan program pengawasan yang dilakukan. Hal ini dapat membantu untuk melancarkan aliran informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan nantinya, sehingga data-data tersebut dapat mendukung evaluasi dan pelaporan yang objektif, proporsional dan bertanggungjawab.

Pengawasan Kebijakan Dan Program

Kebijakan dan program merupakan 2 hal yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, dalam hal ini PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling.

Kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pembina akan mempengaruhi tugas dan fungsi lembaga, dan ini dapat berpotensi mengganggu kelancaran operasional di PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling. Untuk mengantisipasinya akan muncul kebijakan dari pimpinan satker untuk mengeliminir atau mereduksi kemungkinan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling. Hal ini juga dapat menyebabkan konflik yang akan terjadi karena adanya kepentingan yang tidak terakomodir dalam kebijakan yang diambil.

Program merupakan dasar dalam sebuah lembaga melakukan aktivitasnya, dengan program yang tersusun dengan baik akan memudahkan dalam pelaksanaannya, namun bila program tidak tersusun dengan baik maka akan berpotensi memunculkan gangguan-gangguan yang dapat mengganggu secara waktu dan materi.

Pengawasan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Dan Barang Milik Negara

Dengan semakin banyaknya aplikasi-aplikasi yang digunakan baik di kepegawaian, keuangan dan barang milik negara pada saat ini, dan sudah bakunya peraturan yang menjadi landasan pada kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara, menyebabkan potensi masalah yang timbul bias cukup berkurang. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan untuk menimbulkan permasalahan tersendiri.

Untuk aplikasi-aplikasi yang terpusat dengan lembaga pembina bisa menimbulkan permasalahan bila beberapa hal ini terjadi :

- a. Adanya *maintenance* atau pengembangan aplikasi di server induk
- b. Koneksi internet yang kurang memadai



- c. SDM yang kurang menguasai TIK

Pemantauan Dan Pengkoordinasian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Dan Eksternal

sama seperti penyusunan program pengawasan, maka hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan harus dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, sehingga dapat segera ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang masih kurang dalam penilaian monitoring dan evaluasinya.

Pendampingan Dan Reviu Laporan Keuangan

Untuk area ini dirasa perlu adanya pendampingan dan pelatihan dari Inpektorat Jenderal kepada tim SPI, karena tidak menutup kemungkinan anggota SPI belum paham dalam melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan.

Pemberian Saran Dan Rekomendasi

Pemberian saran dan rekomendasi dilakukan dalam 2 semester, hal ini bertujuan untuk mengefektifkan dan memudahkan tim dalam melakukan tugas pokoknya di samping sebagai anggota SPI.

Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan

laporan disusun sebelum akhir semester, karena di akhir semester saran dan rekomendasi yang diusulkan sudah dalam bentuk laporan.

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pengawasan

pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan dilakukan sebelum penyusunan laporan, dan hasil pengawasan dibicarakan dengan sesama tim SPI untuk melihat sejauhmana hasil pengawasan dan potensi-potensi yang timbul serta disusun skala prioritas untuk dituangkan dalam laporan hasil pengawasan.

Demikian program kerja tim SPI di lingkungan PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling pada tahun 2018 disusun sehingga dapat memberikan gambaran secara singkat terhadap program-program yang akan dilakukan oleh Tim SPI.

Seiring dengan berjalannya waktu dan kebutuhan, maka program-program yang telah disusun ini dapat terjadi penyesuaian berdasar kepada kebutuhan dan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.